PILKADA LANGSUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN

OLEH : DR. SURANTO
DOSEN JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN UMY

SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS
EVALUASI PILKADA SERENTAK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
09 APRIL 2016

PENGANTAR

- Pemilu merupakan salah satu amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang harus dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).
- Pemilu yang berkualitas dan demokratis dapat diwujudkan apabila dilaksanakan sesuai dengan asasnya. Adanya Pemilu yang berkualitas dan demokratis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahaan yang baik (good governance)
- Momentum Pilkada Serentak, seharusnya merupakan arena untuk memilih pemimpin daerah yang berani, tegas, teruji, dan mumpuni.
- Oleh karena itu, Pilkada serentak merupakan instrumen membangun good governance serta sistem pemerintahan yang melayani, mengayomi, memberi optmisme dan pencerahan kepada masyarakat,.

SISTEM DEMOKRASI YANG BENAR

- Secara prinsip, sistem demokrasi yang baik adalah sistem yang kualitasnya senantiasa terus berkembang kearah yang lebih baik sejalan dengan perubahan yang ada. Fleksibilitas tersebut dimungkinkan karena sistem perubahan memuat beberapa prinsip: (Dahl, 2001 : 52)

1. Adanya pembatasan kekuasaan dengan jalan memberikan jaminan bagi berlangsungnya proses peralihan kekuasaan secara demokrasi, berkala dengan menggunakan jalur perwakilan efektif;
2. Adanya persamaan hukum bagi seluruh warga negara dan menjauhi watak diskriminatif;
3. Adanya mekanisme kontrol checks and balances;
4. Terbukanya ruang kebebasan berpendapat, baik lisan maupun tulisan;
5. Adanya penghormatan hak-hak minoritas atau individu sebagai bagian yang patut diperhatikan,
6. Dipegangnya prinsip penghormatan hak-hak asasi manusia sehingga dalam penyelesaian yang berkembang di masyarakat, cara refresif dan intimidatif yang menggunakan aparat pemaksa dihilangkan atau tidak diberi tempat

PRINSIP GOVERNANCE (1)

- Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Adapun prinsip-prinsip good governance (Anonim, 2009) :

  1.Partisipasi Masyarakat
  Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

  2.Tegaknya Supremasi Hukum
  Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

  3.Transparansi
  Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

  4.Peduli pada stakeholder
  Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

PRINSIP GOVERNANCE (2)

- **5.Berorientasi pada konsensus**
  Tata kelola pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

  6.Kesetaraan
  Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

  7.Efektifitas dan efisiensi
  Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

  8.Akuntabilitas
  Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

  9.Visi Strategis
  Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

NODA-NODA KEPALA DAERAH TERPILIH HASIL PILKADA

- Kasus korupsi. Data Kementerian Dalam Negeri, ada 343 kepala daerah yang berperkara hukum baik di kejaksaan, kepolisian, mau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara 2012-2014. Sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah.
- Kasus Pesta Sabu. Calon Bupati Ogan Ilir yang gagal dilantik karena tertangkap Nyabu
- Kasus Nepotisme.
- Kasus perombakan birokrasi

AKAR PERMASALAHAN

1) Proses rekrutmen kepala daerah yang kurang memungkinkan terpilihnya kepala daerah berkualitas (baik via perorangan maupun parpol)
2) Regulasi dan implementasinya yang tidak tegas
3) Kultur politik uang dan transaksional
4) Pengkaderan parpol yang tidak berjalan
5) Pengawasan yang terbatas kewenangannya
6) Kesadaran masyarakat yang kurang tentang fungsi Pilkada sebagai ajang rekrutmen pemimpin.

LINGKARAN SETAN PEMERASAN DALAM PILKADA

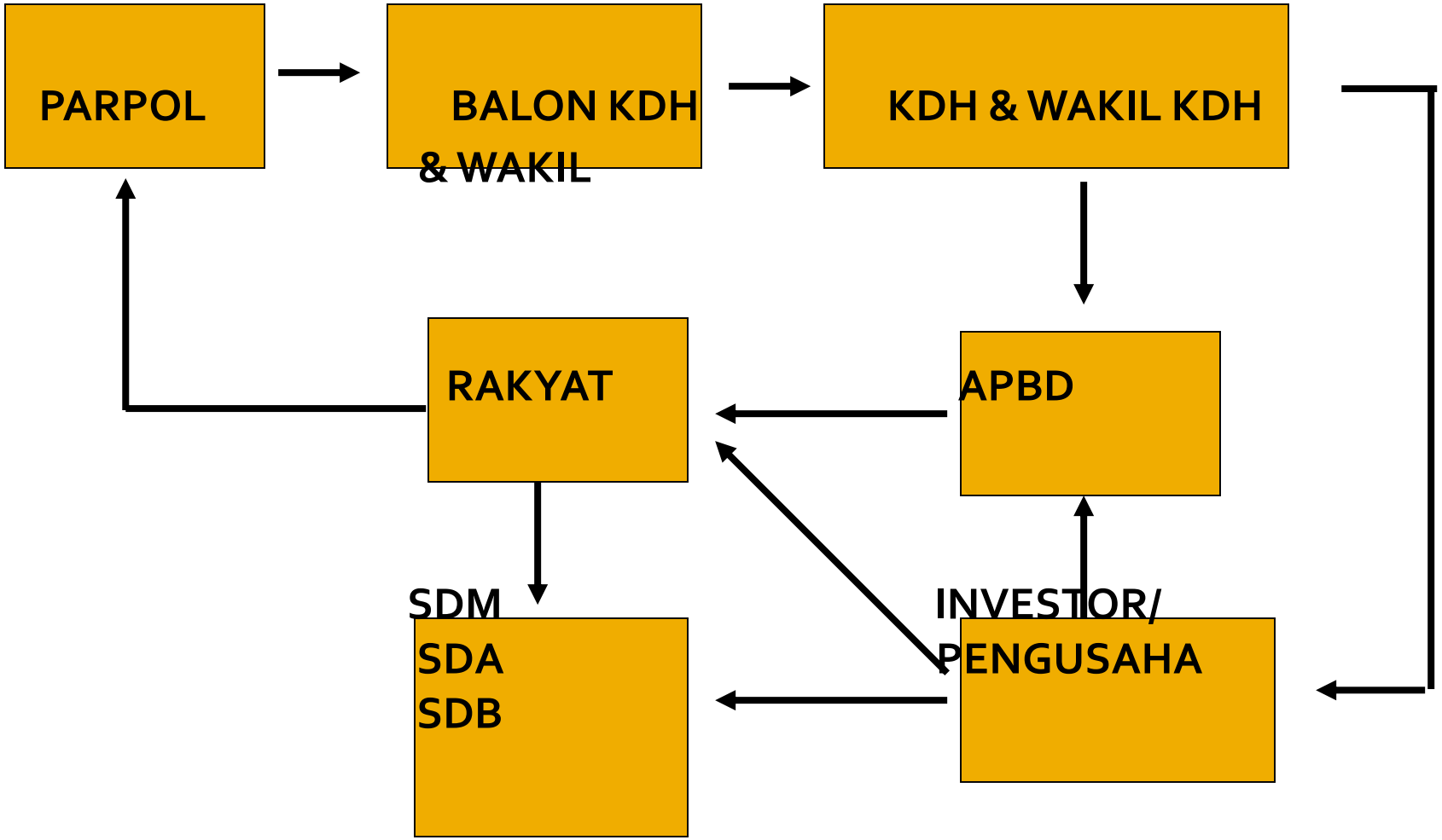

MEMETAKAN ALTERNATIF SOLUSI

1) Pembenahan regulasi
2) Penguatan parpol
3) Implementasi pengawasan
4) Sosialisasi dan penyadaran warga

PERTIMBANGAN DALAM MEMILIH PIMPINAN PEMERINTAHAN

1. **Kapabilitas**

Gambaran kemampuan diri si pemimpin baik intelektual maupun moral, yang dapat dilihat dari catatan jejak (*track record*) pendidikannya maupun jejak sikap dan perilakunya selama ini.

2. **Akseptabilitas**

Gambaran tingkat penerimaan pengikut terhadap kehadiran pemimpin.

3. **Kompatibilitas**

Kemampuan untuk menyesuaikan diri dgn kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya & mengakomodasikan kebijakan dari pemerintah tingkat bawahnya maupun tuntutan dari para pengikutnya.

URUTAN PENTINGNYA ASPEK KEPEMIMPINAN DIKAITKAN DENGAN TINGKATAN PADA POSISI PEMERINTAHAN

NO	Tingkatan Posisi Pemerintahan	Urutan Derajat Urgensi Aspek Kepemimpinan
1.	Presiden	1. Kapabilitas 2. Akseptabilitas 3. Kompatibilitas
2.	Kepala Daerah Propinsi	1. Kompatibilitas 2. Kapabilitas 3. Akseptabilitas
3.	Kepala Daerah Kab /Kota	1. Akseptabilitas 2. Kapabilitas 3. Kompatibilitas
4.	Kepala Desa	1. Akseptabilitas 2. Kompatibilitas 3. Kapabilitas

DAMPAK HASIL PILKADA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DAERAH

- Banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan tata kelola pemerintahan di suatu daerah, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.

- Terkait dengan Pilkada, ada tiga faktor penting yang berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan di daerah yaitu :
  a. Kapabilitas Kepala Daerah terpilih;
  b. Dukungan partai politik yang tercermin melalui anggotanya
  di DPRD;
  c. "Profesionalitas" birokrasi pemerintahan daerah.

PETA HASIL PILKADA TERHADAP KEMAJUAN DAERAH
(Berdasarkan Perpaduan antara Faktor Kapabilitas Kepemimpinan dengan Dukungan Politik dari Parpol Melalui DPRD)

DUKUNGANG POL	RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGGI	**Kemajuan Daerah sangat tergantung pada Parpol pendukung**	**Tingkat kemajuan daerah moderat, apabila didukung birokrasi profesional**	**Tingkat kemajuan daerah akan tinggi**
SEDANG	**Tergantung Dinamika DPRD, Apabila DPRDnya *High Profile*, daerah berpeluang untuk maju**	**Tingkat kemajuan daerah moderat, meskipun cenderung lambat**	**Tingkat kemajuan daerah tinggi apabila DPRD justru bersifat "Low Profile"**
RENDAH	**Daerah akan cenderung mengalami kemandegan, bahkan kemunduran**	**Tingkat kemajuan daerah lambat, sehingga memerlukan konsultansi pihak luar**	**Cenderung banyak konflik politik, membuat kemajuan daerah menjadi lambat**

KAPABILITAS KEPEMIMPINAN

PETA HASIL PILKADA TERHADAP KEMAJUAN DAERAH
(Berdasarkan Perpaduan antara Faktor Kapabilitas Kepemimpinan dengan "Profesionalitas" Birokrasi)

PROFESIONALITAS BIROKRASI	RENDAH	SEDANG	TINGGI
TINGGI	**Kemajuan Daerah sangat tergantung pada ketulusan birokrasi, atau Justru terjadi biropatologi**	**Tingkat kemajuan daerah moderat sampai tinggi apabila dilakukan banyak pendelegasian kew.**	**Tingkat kemajuan daerah akan tinggi**
SEDANG	**Untuk mencapai kemajuan, diperlukan banyak supervisi dari Pem tingkat atasnya dan bantuan pihak luar**	**Tingkat kemajuan daerah moderat, meskipun cenderung lambat**	**Tingkat kemajuan daerah dari moderat ke arah tinggi apabila ada cetak biru yang jelas**
RENDAH	**Daerah akan cenderung mengalami kemandegan, bahkan kemunduran**	**Tingkat kemajuan daerah lambat, sehingga memerlukan konsultansi pihak luar**	**Cenderung menggunakan gaya otoriter untuk membuat daerah maju**

KAPABILITAS KEPEMIMPINAN

SEKIAN

TERIMAKASIH